

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, mutlak diperlukan adanya pembangunan di segala bidang kehidupan. Adapun tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah sebagai berikut :

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹

Dengan demikian berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam usaha pencapaian tujuan Pembangunan Nasional tersebut. Pembangunan Nasional itu harus mampu untuk mengelola segenap aspek yang ada seperti modal, hasil-hasil alam dan sumber tenaga manusia yang merupakan inti suatu keberhasilan dari setiap pelaksanaan pembangunan.

Pegawai Negeri yang merupakan abdi rakyat dan abdi negara juga harus diupayakan untuk dapat dibina dan dibimbing dengan baik, karena sebagai pelaksana

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Himpunan Ketetapan MPR RI*, 2001, hal. 121.

tugas pencapaian tujuan atau unsur pelaksana dalam merealisasikan Pembangunan Nasional itu ada di tangan mereka.

Begitu juga halnya dengan di Bagian Umum Pemerintah Kota Binjai adalah merupakan salah satu instansi pemerintah yang khusus menjalankan kegiatan pencapaian tujuan pemerintah kota tersebut dengan mengupayakan segenap potensi alam, sumber daya manusia dan sumber daya lain, semua kegiatan yang dilakukan merupakan suatu proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sumber daya manusia yang terdapat didalamnya haruslah benar-benar mempunyai tingkat pelaksanaan kerja yang tinggi, sebab tugas yang harus diemban selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaksanaan ke tingkat pusat yang merupakan jenjang resmi.

Salah satu sudut atau titik pandang keberhasilan pengelolaan suatu organisasi adalah tingkat efektivitas kerja seperti yang terdapat dalam pelaksanaan kerja orang-orang dalam organisasi. Menyinggung tentang efektivitas kerja seperti yang dikemukakan oleh Westra Pariatra dkk dalam buku : "Ensiklopedia Administrasi" mengemukakan sebagai berikut :

Suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan, dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya maka orang itu dikatakan efektif, kalau menimbulkan akibat mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.²

² Westra Pariatra, dkk. *Ensiklopedi Administrasi*. Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 108.